

# LAPORAN KINERJA

TAHUN  
2023



**DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KOTA SINGKAWANG**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.


Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singkawang, 17 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Singkawang



**EVAN ERNANDA, S. Kom**  
Pembina Tk. I

NIP. 19710312 200502 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR DIAGRAM .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	3
2.1. Kepala Dinas .....	6
2.2. Sekretariat .....	6
2.3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik .....	7
2.4. Bidang Aplikasi dan Informatika .....	8
2.5. Bidang Statistik dan Persandian .....	10
3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) .....	11
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	12
5. Sumber Daya Keuangan.....	14
6. Sarana dan Prasarana.....	15
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. RENSTRA.....	19
1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama .....	20
1.1. TUJUAN.....	21
1.2. SASARAN STRATEGIS .....	21
1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	21
B. PERJANJIAN KINERJA .....	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	28
B. REALISASI ANGGARAN .....	48
1. Pendapatan Tahun 2023 .....	49
2. Realisasi Belanja .....	50
 BAB IV PENUTUP .....	 52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	5
-------------	--	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan .....	12
Tabel 1.2.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang .....	14
Tabel 1.3.	Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	15
Tabel 2.1.	Target Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang .....	22
Tabel 2.2.	Target Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	22
Tabel 2.3.	Target Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	22
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja.....	25
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Perubahan.....	26
	Sasaran Strategis Terwujudnya e-government yang terintegrasi :	
Tabel 3.1.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	29
Tabel 3.2.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	30
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dengan Target Akhir 2026 .....	31
	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik :	
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	34

Tabel 3.5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	34
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dengan Target Akhir 2026 .....	35
	Sasaran Strategis Meningkatnya keamanan informasi :	
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	37
Tabel 3.8.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	38
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dengan Target Akhir 2026 .....	39
	Sasaran Strategis Cakupan Diseminasi Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Indonesia :	
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	40
Tabel 3.11.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	41
Tabel 3.12.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dengan Target Akhir 2026 .....	42
	Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah :	
Tabel 3.13.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	43
Tabel 3.14.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	44
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dengan Target Akhir 2026 .....	45
Tabel 3.16.	Perbandingan realisasi kinerja 2023 dengan target nasional .....	47
Tabel 3.17.	Realisasi PAD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.....	49
Tabel 3.18.	Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.....	50
Tabel 3.19.	Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 .....	51



## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1.1.	Sumber daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan .....	13
Diagram 1.2.	Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang .....	14
Diagram 1.3.	Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan / cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana kabupaten dan kota memiliki otonomi yang luas dan disesuaikan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi pemekaran urusan otonomi daerah yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor/Departemen/Instansi Vertikal di daerah. Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public good and service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama

yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok, maka perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2023, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai pelaksana urusan bidang komunikasi dan informatika mempertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi

permasalahan yang terjadi kedepannya. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan inilah maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja instansi bukan diukur berdasarkan capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPD Tahun 2023-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

## **2. Susunan Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, yang membawahi :

### **1. Kepala Dinas**

### **2. Sekretariat membawahi :**

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

### **3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :**

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

**4. Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi :**

- a. Seksi Infrastruktur dan Layanan E-Government
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika

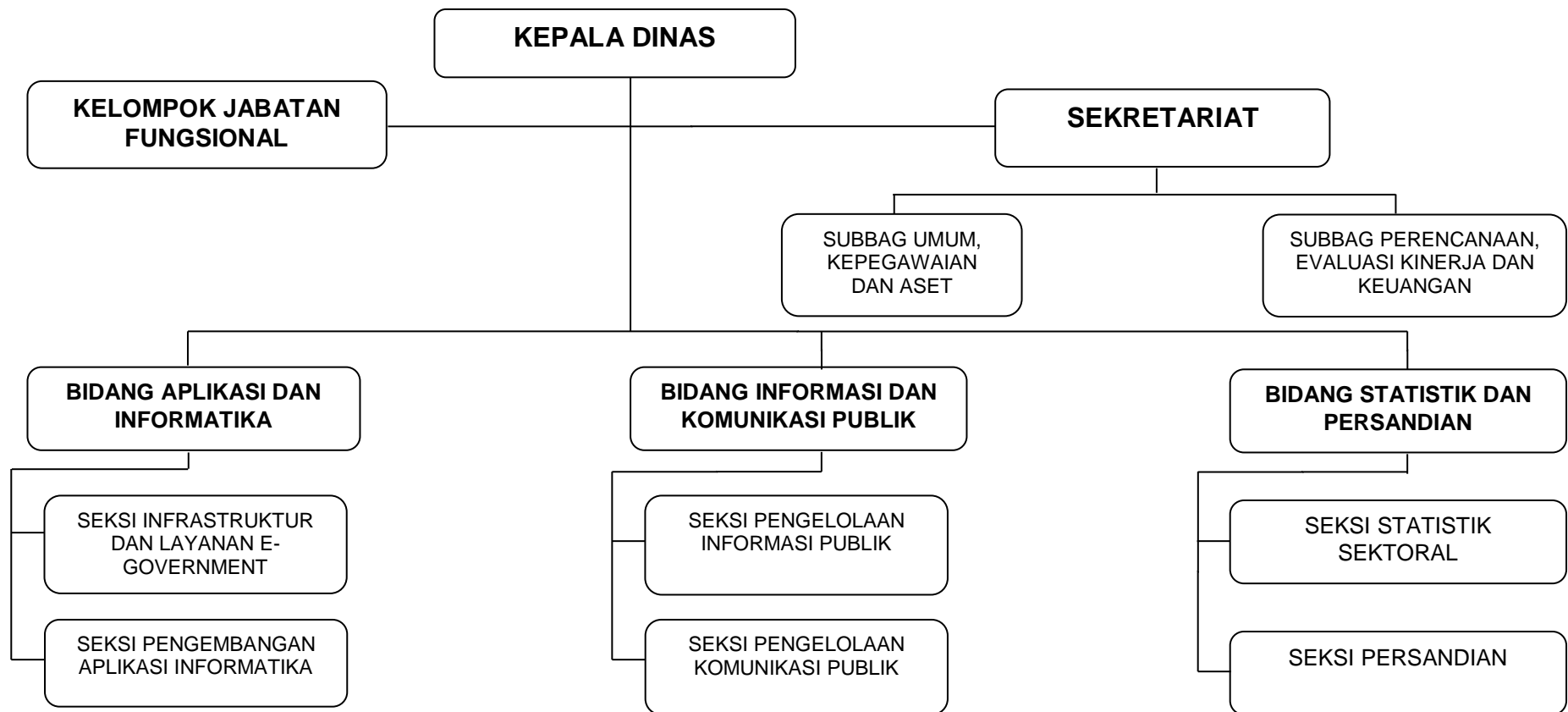
**5. Bidang Statistik dan Persandian membawahi :**

- a. Seksi Statistik Sektoral
- b. Seksi Persandian

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang memiliki Struktur Organisasi dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**



## **2.1. Kepala Dinas**

### **a. Tugas**

Memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Fungsi**

- Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan administrasi Dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sekretariat**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian dan aset, perencanaan dan evaluasi kinerja, serta keuangan.

### **b. Fungsi**

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariat; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset** , mempunyai tugas:

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan aset.

- 2) **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

## **2.3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik meliputi pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

### **b. Fungsi**

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik.



- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, Yaitu : Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang pengelolaan informasi publik.

2) **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang pengelolaan komunikasi publik.

## **2.4. Bidang Aplikasi dan Informatika**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Aplikasi dan Informatika yang meliputi infrastruktur dan

layanan *e-government* serta pengembangan aplikasi informatika.

**b. Fungsi :**

- Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi dan informatika;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan layanan *e-government* serta pengembangan aplikasi informatika;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan layanan *e-government* serta pengembangan aplikasi informatika;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan layanan *e-government* serta pengembangan aplikasi informatika;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, yaitu : Infrastruktur dan Layanan *E-Government* dan Pengembangan Aplikasi Informatika, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

**1) Seksi Infrastruktur dan Layanan *E-Government*, mempunyai tugas :**

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang infrastruktur dan layanan *e-government*.

2) **Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang pengembangan aplikasi informatika.

## **2.5. Bidang Statistik dan Persandian**

### **a. Tugas**

Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian meliputi Statistik Sektoral dan Persandian.

### **b. Fungsi :**

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang statistik dan persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang statistik sektoral dan persandian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang statistik sektoral dan persandian;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang statistik sektoral dan persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) Seksi, yaitu : Seksi Statistik Sektoral dan Seksi Persandian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) **Seksi Statistik Sektoral**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang statistik sektoral.

2) **Seksi Persandian**, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan persandian.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- Pelaksanaan administrasi Dinas;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, ketersediaan sumber daya aparatur / personil yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor penting yang harus dipenuhi. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh personil dinas yang tersedia.

Dari segi kualitas, dirasakan disiplin, kompetensi dan kemampuan personil masih belum sepenuhnya memadai. Pelaksanaan tugas dan permasalahan lapangan penyelesaiannya terkesan lambat, tidak tuntas dan sering berdampak pada beban bagi atasan. Pada sisi lain upaya untuk meningkatkan kemampuan personil melalui program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang semestinya karena kurangnya dukungan anggaran yang disediakan.

Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sampai dengan Desember 2023 berjumlah 51 orang yang terdiri dari 31 orang PNS, 3 orang P3K dan 16 orang Tenaga PTT / Honorer yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menurut latar pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

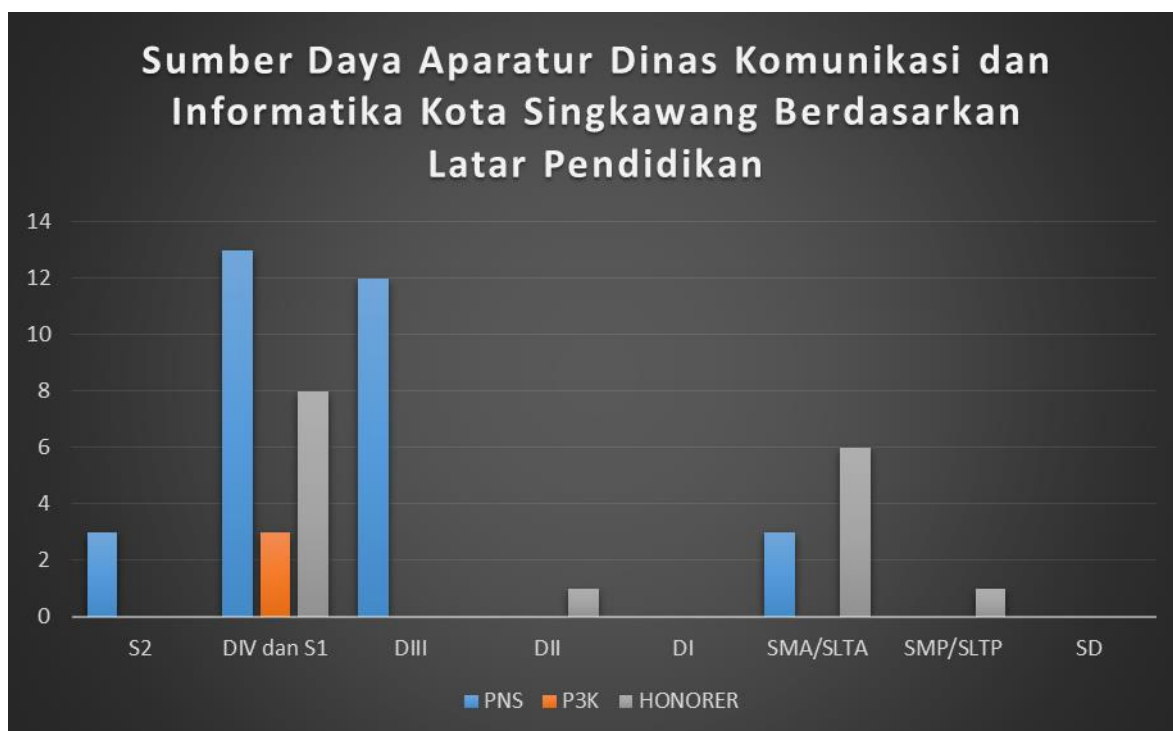
**Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan**

NO.	LATAR PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)		
		PNS	P3K	HONORER
1.	S2	3	-	-
2.	DIV dan S1	13	3	8

3.	DIII	12	-	-
4.	DII	-	-	1
5.	DI	-	-	-
6.	SMA/SLTA	3	-	6
7.	SMP/SLTP	-	-	1
8.	SD	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

*Sumber : DUK Diskominfo per Desember 2023*

**Diagram 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Latar Pendidikan**



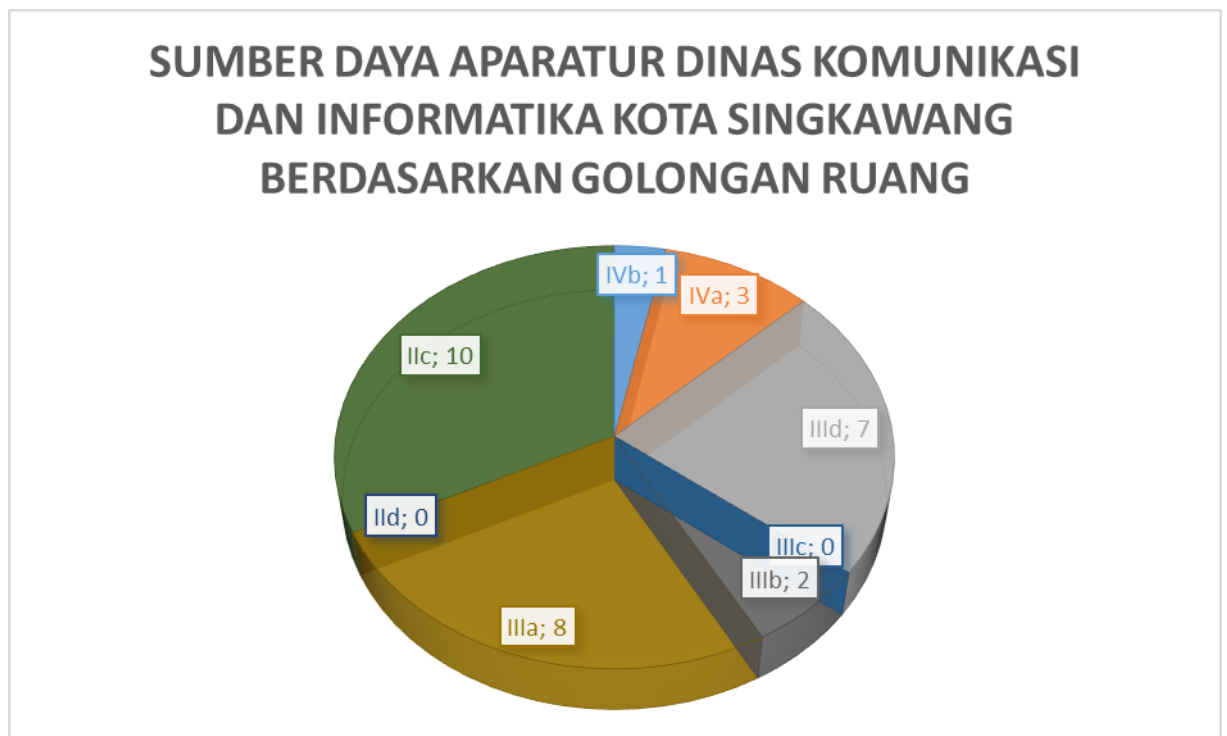
Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknis. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat S1.

**Tabel 1.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang**

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	IVb	1
2.	IVa	3
3.	IIId	7
4.	IIIc	0
5.	IIIB	2
6.	IIIA	8
7.	IIId	0
8.	IIC	10
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>

*Sumber : DUK Diskominfo per Desember 2023*

**Diagram 1.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Berdasarkan Golongan Ruang**



## 5. Sumber Daya Keuangan

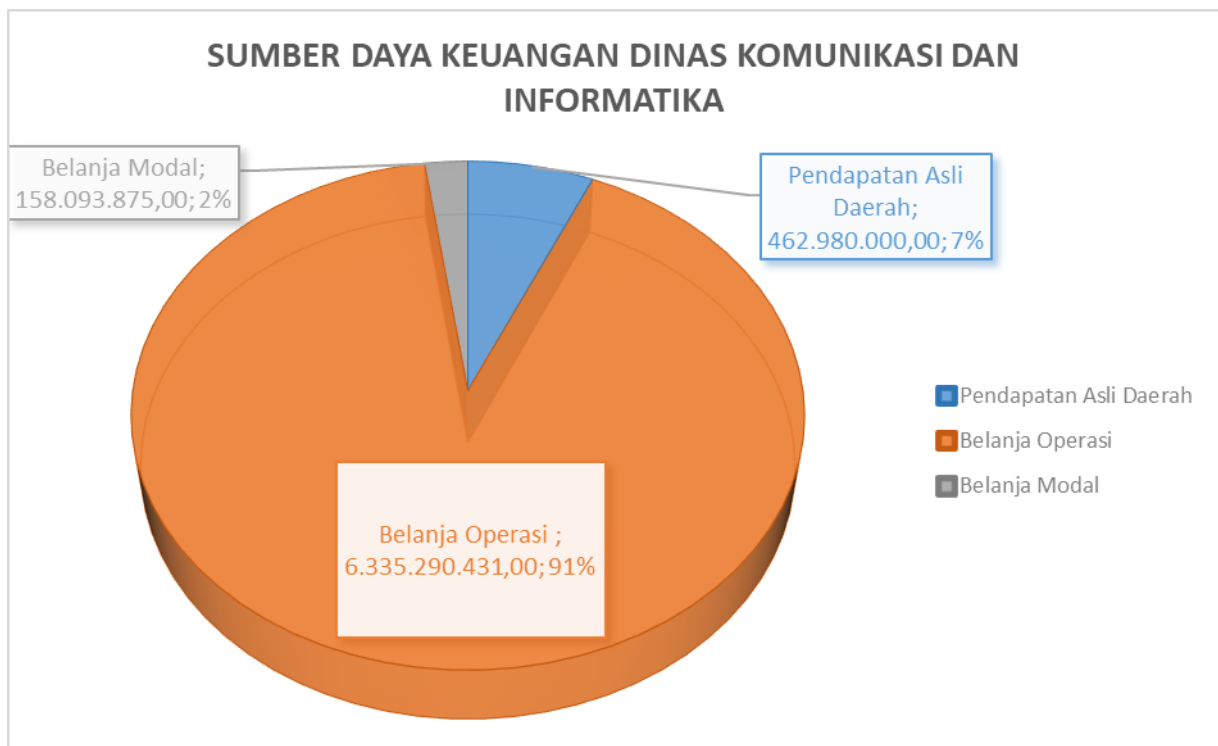
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada tahun 2023 dibiayai oleh dana belanja yang diperoleh dari dana APBD Kota Singkawang. Jumlah sumber dana keuangan dengan *surplus* ( defisit ) sebelum perubahan Rp.6.202.823.899,00 dan setelah perubahan sebesar Rp.6.493.384.306,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3. Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO.	URAIAN	Anggaran Diskominfo
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	Rp. <b>462.980.000,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 462.980.000,00
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	Rp. <b>6.493.384.306,00</b>
2.1	Belanja Operasi	Rp. 6.335.290.431,00
2.2	Belanja Modal	Rp. 158.093.875,00

Sumber : DPA Perubahan Diskominfo 2023

**Diagram 1.3. Sumber Daya Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika**



Sumber : DPA Perubahan Diskominfo 2023



## **6. Sarana dan Prasarana**

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sebagaimana yang diharapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selain atas usaha para personil dan dukungan dari semua pihak juga tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Data sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terlampir.

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

### **1. Isu *Sustainable Development Goals* (SDG's)**

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

- a) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;

- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

## 2. Isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai

tambah perekonomian rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

Rencana strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja, serta merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang untuk periode Tahun 2023-2026 dan dijabarkan per tahun yang merupakan rangkaian pembangunan bidang komunikasi dan informatika berkelanjutan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Dalam kurun waktu 2023 - 2026 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional.

Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi Indonesia. Untuk mencapai hasil yang diinginkan selama 4 (empat) tahun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang menetapkan rencana

strategis, tujuan, dan sasaran serta rencana kerja yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun.

### **1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

Tujuan merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan perangkat daerah.

Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan yakni “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi” dengan Indikator Tujuan berupa “Indeks Reformasi Birokrasi” serta Sasaran Strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan Indikator Sasaran yaitu : 1. **Indeks SPBE**; 2. Nilai LPPD; 3. Nilai Sakip dan 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

Untuk mencapai Misi ke-4 tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan, sasaran strategis beserta indikator kinerja utama sebagai berikut :

### **3.1 TUJUAN**

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yaitu :

1. Terintegrasinya Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Singkawang.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah :

1. Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

### **3.2 SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran strategis yakni :

1. Terwujudnya e-government yang terintegrasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik;
3. Meningkatnya keamanan informasi;
4. Cakupan diseminasi data statistik sektoral pada portal Satu Data Indonesia.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut yaitu adalah :

1. Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-government;
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik;
3. Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah;
4. Persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia.

### **3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dari tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Singkawang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Capaian setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks SPBE	2,6 (BAIK)	2,6 (BAIK)	2,6 (BAIK)	2,6 (BAIK)

**Tabel 2.2.**  
**Target Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Terintegrasinya Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Singkawang	Layanan SPBE	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2

**Tabel 2.3.**  
**Target Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Capaian setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-goverment	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	87 (BAIK)	87,5 (BAIK)	88 (BAIK)	88,5 (BAIK)
3.	Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan diseminasi data statistik sektoral	Persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia	70%	80%	90%	100%

	pada portal Satu Data Indonesia					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib untuk menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja setiap satuan kerja menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja



(*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud keseimbangan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yakni :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja**

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-goverment	29 PD	Program Aplikasi Informatika	1.077.941.957
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	87 (BAIK)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	299.049.900
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	29 PD	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	52.915.700
Cakupan diseminasi data statistik sektoral	Persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia	70%	Program Penyelenggaraan	169.075.300

pada portal Satu Data Indonesia			Statistik Sektor	
---------------------------------	--	--	------------------	--

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan**

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan perangkat daerah yang terintegrasi dengan e-goverment	29 PD	Program Aplikasi Informatika	1.077.574.836
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	87 (BAIK)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	633.806.900
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	29 PD	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	52.810.075

Cakupan diseminasi data statistik sektoral pada portal Satu Data Indonesia	Persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia	70%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	169.045.400
--	---	-----	--	-------------

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**

kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan implementasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku pelaksana sebagian kebijakan dari pemerintah daerah, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Adapun data-data dan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis Terwujudnya e-government yang terintegrasi**
  - a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Tabel 3.1.  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government	29 OPD	29 OPD	100%

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Sesuai dengan Tabel 3.1 Sasaran Strategis Terwujudnya e-government dari 29 (dua puluh Sembilan) OPD sebagai sasaran telah terintegrasi semua sesuai dengan target, dengan kata lain capaiannya adalah 100%.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

## 1) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2.

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Aplikasi Informatika	1.077.574.836	1.042.778.235	96,77	100%	3,23%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,77% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 3,23%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## 2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan :
  - a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
    - Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota capaian 100%.
    - Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah capaian 100%.
  - b. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten / kota, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik capaian 100%.
- Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik capaian 100%.
- Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota Cerdas capaian 100%.
- Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah capaian 100%.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.3.

Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022, 2023 dengan target akhir 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2026
		2021	2022	2023	
Terwujudnya e-government yang terintegrasi	Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indikator Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government mencapai target, hal ini disebabkan :

1. Semua perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang (berjumlah 29 OPD) sudah terintegrasi dengan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dimana masing-masing perangkat daerah sudah memiliki website dan email dinas yang terhubung dengan portal singkawangkota.go.id, sehingga publik yang akan mengakses



informasi dari OPD manapun cukup masuk melalui 1 portal saja dan dapat terhubung dengan semua OPD yang ada di Kota Singkawang.

2. Jumlah sub domain Singkawang sd Desember 2023 = 100 Sub Domain singkawangkota.go.id.
3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah = 100 Mbps untuk 19 Server OPD, 46 CCTV, 78 titik Jaringan Intra, TCM, livestreaming, PKB/KIR, Back Up Disdukcapil, PPDB, 10 mbps Kelurahan Setapak Besar, 10 mbps Kelurahan Sagatani.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik = 3 integrasi (SIM Kelurahan, SIM Kecamatan, Integrasi Cloud).
5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik = 3 Aplikasi (Pengajuan Produk Hukum, PPID, Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan SPBE (Simpan SPBE).
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah = 20 Aplikasi, terdiri dari :
  1. website Puskesmas Utara 1
  2. website Puskesmas Utara 2
  3. Website Puskesmas Barat 1
  4. Website Puskesmas Barat 2
  5. Website Puskesmas Timur 1
  6. Website Puskesmas Timur 2
  7. Website Puskesmas Selatan 1
  8. Website Puskesmas Selatan 2
  9. Website Puskesmas Tengah 1
  10. Website Puskesmas Tengah
  11. Website DinsosPPA
  12. Website DPKPP
  13. Website Disparpora
  14. Website Kesbangpol
  15. website Disperkimta
  16. website Dinskes KB
  17. Website Bappeda
  18. Email

19. CCTV Pantau Kota

20. Portal Singkawang Kota

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator Cakupan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan E-Government, antara lain :

- Server sebanyak 21 buah (Kondisi Baik 14, Kurang baik 7, Rusak 2).
- Bandwitdh Dedicated tidak memiliki back up.
- CCTV belum semua menggunakan kabel Fiber Optik (FO).
- Tidak adanya kendaraan operasional untuk pengendalian menara telekomunikasi dan jaringan intra.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Penggantian server dengan kondisi kurang baik sebanyak 7 server, terutama segera dilakukan penggantian server untuk kondisi rusak sebanyak 2 server.
- Penambahan back up bandwidth dedicated, sehingga apabila terjadi kerusakan/error/crash pada 1 bandwidth maka dengan adanya backup bisa dialihkan ke bandwidth lainnya, sehingga tidak mengganggu aktifitas (aktifitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar).
- Penambahan kabel Fiber Optik (FO) untuk CCTV agar monitoring CCTV di beberapa titik kota dapat terus terpantau dengan lancar tanpa ada gangguan jaringan.
- Pengadaan kendaraan operasional untuk monitoring pengendalian 125 menara telekomunikasi dan jaringan intra di 5 kecamatan di Kota Singkawang.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.4.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik	87 (BAIK)	87,17 (BAIK)	100,19%

Pada Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik dengan Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik target Tahun 2023 adalah 87 (Baik) realisasinya adalah 87,17 (Baik) yang berarti capaiannya adalah 100,19%.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

#### 1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.5.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan	Informasi dan Komunikasi Publik	633.806.900	629.971.172	99,39	111,74%	12,35%

informasi publik						
------------------	--	--	--	--	--	--

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,39% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 111,74%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 12,35%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**2) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Adapun program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja 111,74%, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik capaian 100%.
- Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik capaian 130%.
- Pengelolaan media komunikasi publik capaian 117%.
- Pelayanan informasi publik capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.6.

Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022, 2023 dengan target akhir 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2026
		2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas	Indeks kepuasan masyarakat	86,33 (BAIK)	87,05 (BAIK)	87,17 (BAIK)	88,5 (BAIK)

pelayanan data dan informasi publik	terhadap layanan data dan informasi publik				
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Sedangkan pada Sasaran kedua yakni Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik dengan Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik, realisasi dari tahun 2021, 2022 dan 2023 **MENINGKAT** yakni pada tahun 2021 86,33 (Baik), tahun 2022 87,05 (Baik) dan tahun 2023 87,17 (Baik).

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik melebihi target, hal ini disebabkan :

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik se-Kalimantan Barat tahun 2023 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang memperoleh **Peringkat KELIMA** dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sebagai Badan Publik yang melaksanakan keterbukaan informasi dengan kualifikasi **INFORMATIF** (Zona Hijau) dengan nilai **91,99 MENINGKAT** dari tahun 2022 dengan nilai “89,93” (naik 6,12 dari tahun lalu). Pada tahun 2021 memperoleh nilai “85,87” dan menduduki peringkat ke-11 dan untuk tahun 2022 mendapat peringkat ke-10 sedangkan untuk tahun 2023 naik sebanyak 5 peringkat dari tahun sebelumnya;
2. Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kominfo *melaunching* NTPD (Nomor Tunggal Panggilan Darurat) SIGAP (Singkawang Tanggap) 112 yang terdiri dari layanan bencana alam, pencurian, kebakaran, banjir, kecelakaan, hewan buas, ambulance gawat darurat, tindak criminal, terorisme, pohon tumbang dan kerusakan konstruksi bangunan yang menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat.

3. Penambahan SDM dengan keahlian khusus seperti desain grafis dan spesialis konten sehingga infografis yang *diposting* lewat *social media* Kominfo lebih menarik.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi publik, antara lain :

- Kurangnya partisipasi masyarakat Kota Singkawang dalam meminta informasi publik, padahal sudah disediakan wadah untuk meminta informasi publik yakni [ppid.singkawangkota.go.id](http://ppid.singkawangkota.go.id) dan [lapor.go.id](http://lapor.go.id). Pemohon informasi pada tahun 2023 sebanyak 221 pemohon saja, namun di banding tahun 2022 mengalami banyak peningkatan di mana pada tahun 2022 hanya 13 pemohon saja.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Melakukan sosialisasi, membuat infografis dan videografis agar pesan yang dibuat mudah tersampaikan ke masyarakat.

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya keamanan informasi

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;

Tabel 3.7.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	29 PD	29 PD	100%

Pada sasaran meningkatnya keamanan informasi dengan Indikator Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah target Tahun 2023

adalah 29 PD realisasinya adalah 29 PD yang berarti capaiannya adalah 100%.

Salah satu wujud Ekosistem Digital Terpercaya adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi individu, organisasi, dan server milik masyarakat dan pemerintah setelah melalui proses verifikasi identitas. Sertifikat Elektronik inilah yang digunakan dalam berbagai layanan digital terpercaya seperti untuk Tanda Tangan Elektronik, Segel Elektronik, Penanda Waktu Elektronik, dan lain-lain. Untuk itu Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, telah melakukan kerjasama dengan BSrE / BSSN (Badan Sertifikasi Elektronik / Badan Siber Sandi Negara) dalam penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik). Mulai tahun 2022, semua perangkat daerah di Kota Singkawang sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

**1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel 3.8.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya keamanan informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	52.810.075	44.781.430	84,79	100%	15,21%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 84,79% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 15,21%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**2) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Adapun program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota dengan sub kegiatan :
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.9.

Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022, 2023 dengan target akhir 2026

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>REALISASI</b>			<b>TARGET 2026</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Meningkatnya keamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	24 PD	29 PD	29 PD	29 PD

Adapun untuk sasaran ketiga yakni meningkatnya keamanan informasi dengan indikator cakupan pengamanan informasi perangkat daerah, realisasi pada tahun 2021 hanya 24 PD yakni Dinas Komunikasi dan Informatika dan realisasi pada tahun 2022 adalah 29 PD. Untuk tahun



2023 semua perangkat daerah di Kota Singkawang sebanyak 29 PD sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Untuk tahun 2020 pengamanan informasi perangkat daerah baru bisa dilaksanakan pada Dinas Kominfo saja mengingat Bidang Persandian baru dibentuk pada tahun 2020 berdasarkan Perwako Singkawang Nomor 6 Tahun 2020. Untuk tahun 2021 ditargetkan pengamanan informasi perangkat daerah bisa dilaksanakan pada 24 OPD. Mulai tahun 2022 semua perangkat daerah di Kota Singkawang sebanyak 29 PD sudah menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tidak hanya di perangkat daerah saja, bahkan kelurahan pun ada yang sudah menerapkan TTE.

**4. Sasaran Strategis Cakupan Diseminasi Data Statistik Sektorial pada Portal Satu Data Indonesia**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;**

Tabel 3.10.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Cakupan diseminasi data statistik sektorial pada portal Satu Data Indonesia	Persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia	70%	70,31%	100,44%

Pada sasaran cakupan diseminasi data statistik sektorial pada portal Satu Data Indonesia target tahun 2023 adalah 70% yaitu 220 data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia berbanding 320

data indikator yang ada. Sedangkan realisasinya adalah 70,31% sebanyak 225 data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia.

Data indikator yang diinput pada portal Satu Data Indonesia harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yaitu :

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini :

**1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Tabel 3.11.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Cakupan diseminasi data statistik sektoral pada portal Satu Data Indonesia	Persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia	169.045.400	161.608.077	95,60	100,44%	4,40%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,60% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,44%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 4,40%.

Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**2) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Adapun program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan statistik sektorial dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektorial capaian 100%.
  - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistisk Daerah yang Terintegrasi capaian 100%.
  - Pengembangan Infrastruktur capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.12.

Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022, 2023 dengan target akhir 2026

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>REALISASI</b>			<b>TARGET 2026</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Cakupan diseminasi data statistik sektorial pada portal Satu Data Indonesia	Persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia	-	-	70%	100%

Adapun untuk sasaran ketiga yakni cakupan diseminasi data statistik sektorial pada portal Satu Data Indonesia dengan indikator persentase data indikator yang terinput pada portal Satu Data Indonesia,

tidak ada realisasi pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan sasaran dan indikator ini baru ada pada tahun 2023. Target tahun 2023 adalah 70% yaitu sebanyak 220 data indikator yang diinput pada portal Satu Data Indonesia terhadap 320 data indikator yang ada. Sedangkan target akhir tahun 2026 adalah 100% yakni 320 data indikator terinput pada portal Satu Data Indonesia.

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengisian data indikator pada portal Satu Data Indonesia adalah data yang di input oleh perangkat daerah belum semua dapat memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Selain itu PIC pada perangkat daerah yang sudah diberi pelatihan/bimtek dalam pengisian data indikator pada portal Satu Data Indonesia ada beberapa yang mutasi/pindah sehingga perangkat daerah kekurangan operator untuk pengentryan data sehingga pengisian data tidak terpenuhi. Sehingga Dinas Kominfo harus mendata ulang PIC di perangkat daerah dan memberikan bimtek/pelatihan ulang untuk PIC baru.

**5. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;**

Tabel 3.13.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2022 adalah BB. Sedangkan untuk realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu B, namun Dinas Kominfo berhasil meraih Peringkat Kedelapan dari 29 perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Sedangkan untuk Tahun 2023 nilai SAKIP Dinas Kominfo mengalami peningkatan dari B dengan nilai 64,65 menjadi BB dengan nilai 70,25.

Dinas Komunikasi dan Informatika terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibawah ini:

#### 1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.14.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.560.147.095	4.378.553.465	96,01	100%	3,99%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,01% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 3,99%.

**2) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Adapun program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian 100%.
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Dinas Kominfo**

Tabel 3.15.

Perbandingan realisasi kinerja 2021, 2022, 2023 dengan target akhir 2026

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI</b>			<b>TARGET 2026</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	BB	BB

Adapun untuk Sasaran keempat yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah, realisasi tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yakni dari B menjadi BB.

**c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Strategi dalam penguatan nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui upaya serta langkah memperkuat lembaga dalam menjawab tantangan di era globalisasi. Untuk itu perlu dibangun komitmen semua ASN bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan sehingga pola pikir dan budaya kerja lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan kedepan yang harus diselesaikan, diantaranya :

1. Masih terdapat ASN yang belum komitmen dalam melaksanakan penguatan nilai SAKIP;
2. Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
5. Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
6. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik.

Hal-hal tersebut di atas menjadi beberapa kendala sehingga penguatan nilai SAKIP belum sepenuhnya optimal. Kendala-kendala tersebut di atas dihadapi oleh ASN pada Dinas Kominfo sebagai dampak dari luar.

**6. Perbandingan antara realisasi kinerja (*benchmark* kinerja) tahun 2023 dengan target atau capaian nasional**

Tabel 3.16.

Perbandingan realisasi kinerja 2023 dengan target nasional

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>TARGET / CAPAIAN NASIONAL</b>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang	3,33 (BAIK)	2,60 (BAIK)

Pada tahun 2018, Indeks SPBE Kota Singkawang di targetkan nilainya 1,7 “Kurang” sedangkan realisasi untuk tahun 2018 nilainya 1,74 “Cukup” artinya target yang telah ditetapkan tercapai. Sedangkan untuk tahun 2019, Indeks SPBE Kota Singkawang di targetkan nilainya 1,8 “Cukup” (naik 0,1 dari tahun sebelumnya) sedangkan realisasi untuk tahun 2019 nilainya 1,9 “Cukup” artinya target yang telah ditetapkan tercapai bahkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 0,1.

Sedangkan untuk tahun 2020, Indeks SPBE Kota Singkawang di targetkan nilainya 2,0 “Cukup” (naik 0,2 dari tahun sebelumnya) sedangkan realisasi untuk tahun 2020 tidak ada hasil penilaian dari Menpan RB. Namun untuk hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang nilai Indeks SPBE Kota Singkawang Tahun 2020 adalah 3,82 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 191%.

Untuk tahun 2021, Indeks SPBE Kota Singkawang di targetkan nilainya 2,25 “Cukup” (naik 0,25 dari tahun sebelumnya) sedangkan realisasi untuk tahun 2021 berdasarkan penilaian dari Kemenpan RB nilainya 2,6 “BAIK” artinya target yang telah ditetapkan tercapai bahkan



realisasi jauh melebihi target yang telah ditetapkan yakni dari “Cukup” menjadi “BAIK” (naik sebesar 0,35%).

Pada tahun 2022, Indeks SPBE Kota Singkawang di targetkan nilainya 2,5 “Cukup” (naik 0,25 dari tahun sebelumnya) sedangkan realisasi untuk tahun 2022 tidak ada hasil penilaian dari Menpan RB, namun untuk hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang nilainya sama dengan tahun 2021 yaitu 2,6 “BAIK” artinya target yang telah ditetapkan tercapai bahkan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan yakni dari “Cukup” menjadi “BAIK” (naik sebesar 0,1%).

Nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang tahun 2022 adalah 2,6 dengan predikat “Baik” sedangkan untuk target nasional adalah 2,34 dengan predikat “Cukup”. Dengan demikian indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang tahun 2022 sudah melebihi target nasional.

Untuk Tahun 2023, Nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang sangat jauh melampaui dari target yang telah ditetapkan dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya yakni **3,30** dengan Predikat **BAIK** dan memperoleh peringkat **KETIGA** se- Kalimantan Barat setelah Pemerintah Provinsi Kalbar (yang memperoleh peringkat pertama) dan Pemerintah Kota Singkawang (yang memperoleh peringkat kedua). Sedangkan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 – 2026 adalah 2,60 (Baik) sesuai dengan target nasional tahun 2023 dan realisasi tahun 2022.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan meliputi Perhitungan Anggaran ( PA ) Neraca dan Laporan Arus Kas atas pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2023, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Berikut disajikan realisasi atas anggaran pendapatan maupun anggaran belanja berdasarkan angka realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada akhir tahun 2023.

### 1. Pendapatan Tahun 2023

**Tabel 3.17. Realisasi PAD Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	462.980.000,00	415.380.000,00	89,72

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan retribusi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu Rp. 415.380.000,00 atau sebesar 89,72% dari target pendapatan sebesar Rp.462.980.000,00. Hal ini dikarenakan ada beberapa provider telekomunikasi yang sampai akhir Desember 2023 belum melakukan pembayaran, padahal sudah kami tindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan pembayaran, diantaranya adalah :  
1. PT. Indosat; 2. PT. Solusi Tunas Pratama; 3. PT. Centratama Menara.

## 2. Realisasi Belanja

Belanja Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.18. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
		( Rp )	( Rp )	( Rp )	
1.	Belanja Operasi	6.335.290.431	6.102.692.379	232.598.052	96,33
2.	Belanja Modal	158.093.875	155.000.000	3.093.875	98,04
	Jumlah	6.493.384.306	6.257.692.379	235.691.927	96,37

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.19. Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	633.806.900	629.971.172	99,39
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.077.574.836	1.042.778.235	96,77
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	169.045.400	161.608.077	95,60
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFOMASI	52.810.075	44.781.430	84,79
<b>JUMLAH</b>		<b>1.933.237.211</b>	<b>1.879.138.914</b>	<b>94,13</b>

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : realisasi tidak melebihi anggaran. Selain itu berdasarkan skala pengukuran ordinal realisasi dari pelaksanaan seluruh program bisa dikatakan berhasil.

## BAB IV

### PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023 ini, merupakan bentuk laporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Laporan Kinerja Tahunan melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan dengannya, yaitu APBD dan Arah Kebijakan Umum (AKU) Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik dan Persandian yang dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Berdasarkan dokumen tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran yang menjadi perhatian utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Program-program dari sasaran yang termasuk dalam kategori **berhasil** adalah :

- Program Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- Program Aplikasi Informatika;

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah di tuangkan dalam RKA-SKPD / DPA-SKPD / DPPA-SKPD tahun 2023 sebesar Rp. 6.493.384.306,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.257.692.379,00 atau 96,37% dari *plafond* anggaran.

Berdasarkan nilai capaian sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang telah berhasil dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya keras dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika serta dukungan dan partisipasi insan kominfo maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi, diantaranya :

- Rendahnya gaji tenaga honorer yang mengelola TIK, dimana gajinya masih disama ratakan dengan gaji tenaga honorer umum dan masih dibawah UMR Kota Singkawang. Hal ini berakibat Dinas Kominfo kehilangan tenaga programmer;
- Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang terhadap peranan komunikasi dan informatika;
- 21 buah (Kondisi Baik 14, Kurang baik 7, Rusak 2);
- Bandwitdh Dedicated tidak memiliki back up;
- CCTV belum semua menggunakan kabel Fiber Optik (FO);
- Kendaraan Operasional untuk pengendalian Menara telekomunikasi dan jaringan intra dalam kondisi yang tidak baik.

Dalam upaya mengoptimalkan capaian sasaran tahun 2023 dan mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana diatasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal;
2. Dalam tugas-tugas operasional lapangan dan atau penertiban, penugasan staf tidak terbatas hanya dari satu bidang saja tetapi melibatkan staf dari bidang lain dan sekretariat;
3. Memberi kemudahan bagi staf Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan/penyediaan sarana publik seperti CCTV publik, *hotspot*, FO dll;
5. Memaksimalkan pengelolaan *Telematic Control Management (TCM) Room* agar dapat berfungsi dengan optimal;
6. Meningkatkan koordinasi dalam membangun komitmen *stakeholder* dan OPD terkait dalam mengintegrasikan aplikasi yang sudah dan akan diadakan/dikembangkan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten lain (sekitar) dibidang Komunikasi dan Informatika, Bidang *E-Government* dan Telematika dan Bidang Statistik dan Persandian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk pencapaian sasaran.

Singkawang, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



**EVAN ERNANDA, S. Kom**

Pembina Tk. I

NIP. 19710312 200502 1 001